

Pemerintahan Baru Indonesia Hasil Pilpres 2024: Epilog untuk Hasil Survei Sederhana Mahasiswa

Lucinda

Program Studi Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
ml.lucinda@uajy.ac.id

Untuk mengutip artikel ini:

Lucinda. (2025). Pemerintahan Baru Indonesia Hasil Pilpres 2024: Epilog untuk Hasil Survei Sederhana Mahasiswa. *Working Papers Laboratorium Sosiologi FISIP UAJY*, 11(1), 77-92.

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang banyak dianut di dunia karena dianggap sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang paling baik di dunia saat ini. Hakikat demokrasi yaitu “dari, oleh dan untuk rakyat” menjadi salah satu sebab utama mengapa demokrasi saat ini dianggap paling memenuhi harapan sebagian besar rakyat di dunia ini. Dengan demokrasi, semua yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintahan adalah untuk kepentingan rakyat yang telah memilih mereka menjadi pemimpin. Tujuan dari sebuah pemerintahan negara adalah memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyatnya. Untuk tujuan ini, diperlukan pemimpin yang dipercaya rakyat untuk dapat mewujudkannya. Pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan atas nama dan demi kepentingan rakyat ini dipilih dalam sebuah pemilihan umum yang diselenggarakan secara ajeg.

Pemilihan umum atau pemilu adalah salah satu dari prinsip yang harus ada dalam demokrasi yang bertujuan merotasi kekuasaan kepada pihak lain agar kekuasaan dalam negara tidak dipegang oleh satu atau beberapa orang yang sama dalam waktu yang panjang demi menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Pemenang dari pemilihan umum di negara demokratis adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan di negara tersebut atas nama rakyat. Kekuasaan yang diperoleh memiliki legitimasi kuat karena suara yang memenangkan calon atau pasangan calon tertentu berasal dari rakyat. Dalam demokrasi, diakui bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi vox dei*).

Untuk memenangkan pertarungan menuju kekuasaan, kontestan (calon atau pasangan calon) berupaya merebut hati rakyat dengan berbagai janji manis. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masa kampanye pemilu dipenuhi dengan berbagai tawaran manis, bujukan atau rayuan maut dari para kontestan. Pemilu di Indonesia,

sebagai salah satu negara yang menganut demokrasi, sudah dilaksanakan sebanyak 12 kali. Namun, pemilihan presiden dan wakil presiden baru dilaksanakan pada pemilu 2004.

Dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 lalu, dari 3 pasangan calon yang menjadi kontestan, paslon nomor 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenangnya. Mengutip *Kompas.com* (21 Maret 2024), Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 20 Maret 2024 mengumumkan secara resmi pasangan Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024 setelah memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah. Kemenangan Prabowo dan Gibran atas dua paslon lainnya dalam satu putaran cukup mengejutkan karena biasanya cukup sulit bagi satu paslon memperoleh lebih dari 50% suara dalam pemilu yang diikuti tiga paslon. Diyakini banyak pihak bahwa salah satu alasan kemenangan paslon ini adalah karena janji kampanye mereka yang sangat menarik, yaitu program makan siang gratis untuk 80 juta anak sekolah Indonesia dan juga penyediaan 19 juta lapangan pekerjaan.

Dalam kampanye paslon ini, program makan siang gratis dari Prabowo-Gibran bertujuan untuk mengurangi kemiskinan hingga mengatasi *stunting*. Selain program makan siang gratis, program lain yang diyakini juga menjadi daya tarik paslon ini, sehingga cukup banyak meraih suara, adalah janji menyediakan atau menciptakan 19 juta lapangan kerja. Dua program andalan ini memang menjadi program kerja paling menarik yang membawa kemenangan besar bagi paslon Prabowo-Gibran, sehingga terpilih menjadi pemenang Pilpres 2024. Prabowo dan Gibran yang dilantik pada Oktober 2024 membawa banyak harapan akan keberlanjutan beberapa program Presiden Jokowi yang dianggap sangat bermanfaat bagi rakyat, selain program kerja mereka sendiri yang telah dijanjikan akan direalisasikan.

Kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 membawa banyak harapan akan Indonesia yang lebih baik lagi. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pasangan ini terlihat dari persentase kemenangan yang melebihi 50% dalam satu putaran. Di balik hasil Pilpres 2024 ini, ada rasa penasaran dan keingintahuan tentang harapan rakyat terhadap pasangan Prabowo-Gibran yang akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 ini dan apa saja tantangan yang mungkin akan mereka hadapi nantinya. Untuk kepentingan inilah, mahasiswa Program Studi Sosiologi, FISIP UAJY yang mengambil mata kuliah Sosiologi Politik melakukan survei sederhana sebagai tugas untuk Ujian Akhir Semester Genap Tahun Ajaran 2023-2024.

PEMBAGIAN KELOMPOK DAN PENGUMPULAN DATA**Pembagian Kelompok Mahasiswa dan Kelompok Target Survei**

Survei sederhana ini dilakukan mahasiswa mata kuliah Sosiologi Politik untuk mengetahui pandangan berbagai kelompok masyarakat terhadap pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Seluruh mahasiswa (36 orang) dibagi menjadi 6 kelompok dan masing-masing terdiri dari 5-6 mahasiswa. Setiap kelompok harus menentukan kelompok masyarakat yang menjadi target untuk diwawancarai. Setiap mahasiswa wajib mewawancarai minimal dua orang informan yang masuk kategori kelompok masyarakat yang mereka pilih. Pilihan tentang kelompok masyarakat mana yang akan menjadi target survei ditentukan oleh mahasiswa sendiri, namun kelompok masyarakat yang dipilih tidak boleh sama.

Anggota kelompok mahasiswa juga dipilih oleh mahasiswa sendiri. Berikut adalah tabel kelompok masyarakat yang menjadi target survei dari enam kelompok tersebut:

Tabel 1. Daftar Kelompok Mahasiswa

No.	Kelompok Masyarakat yang Menjadi Subjek Survei	Anggota Kelompok Mahasiswa	NPM (Nomor Pokok Mahasiswa)	Lokasi Wawancara
1.	Pengurus Lembaga Kemahasiswaan UAJY (tingkat fakultas dan program studi)	1. Kezia Yulihastuti L. Simanjuntak 2. Samantha 3. Jenar Lintang Dahana 4. Isaac Gilbert Ginting 5. Anisa Elisabeth Harahap	211007533 211007759 211007760 211007761 211007781	DIY (Video Call WA, Google Meet)
2.	<i>Driver Ojek Online</i>	1. Lintang Joanita Prahastuti 2. Selvinna Pepina Erika Asah 3. Debora Devinda Kevas	211007530 211007554 211007564 211007587 211007800	DIY (Kawasan Babarsari, Seturan, Stasiun Lempuyangan, Kotagede) dan Solo

		4. Mayang Brilian Prasetyo 5. Valentinus Dhemas Kusuma Putra		(Kawasan Stasiun Purwosari, Stadion Manahan)
3.	Tukang Becak	1. Estadila Tiariza Widi 2. Fransisca Kiki Lisa 3. Natalia 4. Agnes Shella Rusmawati 5. Riani Yosefani Gultom	211007562 211007719 211007736 211007788 211007806	Depan Mall Amplaz, Malioboro, Pasar Beringharjo, Taman Pintar
4.	Juru Parkir	1. Eva Weneka Kafiar 2. Michael Allesandro Donardi 3. Dhaniel Rahmadin 4. Destri Ferdianisa 5. Michelle Felicia	201007481 211007583 211007672 211007752 211007765	Malioboro Tambakbayan, Kledokan, Tegalrejo
5.	Barista	1. Amanda Randinda Azzahra 2. Steven Moses Soesanto 3. Maulana Ishaq Rajendra 4. Fransiska Meliana 5. Lintang Prabaswara Nayottama	211007534 211007551 211007569 211007730 211007762	Kafe di Kabupaten Sleman

6.	Pedagang Kaki Lima	1. Vijai Vitansi Saragih	181006765	Kawasan Babarsari, Nologaten, Seturan, Mrican
		2. Idamanta Firmandus	181006771	
		3. Kevin Adolf Putra Marbun	191007060	
		4. Valensio Sandro Handika	201007475	
		5. Gregorius Yuventus Pito W.	201007301	
		6. Atthaya Rakha Ismaya	201007474	

Sumber: dokumen penulis.

Daftar Pertanyaan Survei

Untuk kepentingan survei, dosen pengampu dan mahasiswa berdiskusi serta merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada anggota kelompok masyarakat. Berikut adalah lima pertanyaan yang digunakan oleh semua kelompok mahasiswa untuk mewawancarai anggota dari berbagai kelompok masyarakat:

1. Apa harapan Anda terhadap pemerintahan baru (presiden dan wakil presiden) yang akan dilantik pada Oktober 2024 nanti? Apa alasannya?
2. Program kerja apa dari pemerintahan baru yang Anda harapkan harus diwujudkan? Apa alasannya?
3. Menurut Anda, tantangan atau masalah apa yang nantinya akan dihadapi oleh pemerintahan baru? Apa alasannya?
4. Menurut pendapat Anda, apakah pemerintahan baru nanti mampu mewujudkan secara maksimal Indonesia Emas 2045 lewat berbagai program kerjanya? Apa alasannya?
5. Menurut pendapat Anda, program kerja apa dari pemerintahan lama yang perlu diteruskan oleh pemerintahan baru mendatang? Apa alasannya?

TEMUAN DARI MAHASISWA

Dari semua kelompok masyarakat yang diwawancarai, kelompok pengurus lembaga kemahasiswaan dan kelompok barista bisa dianggap mewakili generasi milenial atau generasi muda saat ini. Mereka juga bisa disebut mewakili kelas menengah. Sedangkan empat kelompok lainnya mewakili masyarakat kelas bawah,

yaitu dari masyarakat yang berprofesi sebagai juru parkir, tukang becak, pengemudi ojek online, dan pedagang kaki lima (PKL).

Selama melakukan survei, tidak semua anggota masyarakat dari kelompok yang menjadi target wawancara mahasiswa bersedia menjawab pertanyaan survei. Ada anggota masyarakat yang menolak menjadi narasumber dengan alasan mereka tidak mengikuti dan tidak paham politik atau karena mereka khawatir pendapat mereka nantinya akan menjadi masalah di kemudian hari. Hal ini terjadi setelah mereka membaca pertanyaan yang menurut mereka cukup sensitif sehingga mereka tidak berani memberikan pendapat mereka terhadap pemerintahan baru hasil Pilpres 2024. Calon narasumber yang menolak diwawancarai berasal dari kelompok pengemudi ojek online dan juru parkir. Ketika ada calon narasumber yang menolak diwawancarai, maka mahasiswa mencari narasumber lain yang bersedia diwawancarai untuk memenuhi kewajiban setiap mahasiswa yang harus mewawancarai minimal dua orang narasumber.

Berdasarkan hasil wawancara oleh mahasiswa kepada 6 jenis kelompok masyarakat, berikut adalah rangkuman dari pendapat anggota masyarakat tersebut:

Terkait dengan Harapan Masyarakat terhadap Pemerintahan Baru Hasil Pilpres 2024

Secara umum, semua kelompok masyarakat memiliki harapan agar pemerintah baru Prabowo-Gibran memperhatikan sektor ekonomi dan fokus pada perbaikan ekonomi, harga bahan pangan yang terjangkau, dan terciptanya lapangan kerja yang memadai. Di bidang hukum, secara umum kelompok ojek online, tukang becak, juru parkir, PKL mengharapkan adanya kepastian dan keadilan hukum, tegas dan tidak memihak, serta hukum yang mampu mengatasi masalah korupsi yang marak di Indonesia. Bahkan, pengurus lembaga kemahasiswaan mengharapkan pemerintahan Prabowo-Gibran mampu membangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan.

Bidang pendidikan juga menjadi harapan narasumber karena pendidikan dianggap sebagai modal penting menuju bangsa yang kuat dan sukses. Pendidikan murah, bahkan gratis menjadi harapan besar, khususnya bagi kalangan ekonomi kelas bawah. Pendidikan yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat juga harus ditingkatkan kualitasnya. Selain itu, ada harapan bahwa pemerintah baru dapat mengembangkan dan memajukan pendidikan sampai ke daerah-daerah terpencil agar semua anak memperoleh hak mereka atas pendidikan.

Kelompok juru parkir memiliki harapan bahwa pemerintah baru bisa menurunkan biaya berobat karena biaya berobat sekarang ini sangat mahal. Ternyata, beberapa juru parkir belum memiliki kartu BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat

akibat ketidaktahuan mereka tentang cara memperoleh 2 kartu ini. Bahkan, kelompok barista memiliki pemikiran bahwa bila kualitas pelayanan kesehatan, juga kualitas pendidikan di Indonesia yang ditingkatkan, rakyat Indonesia bisa menjadi bangsa yang sehat dan kuat sehingga sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing di tingkat global.

Satu hal menarik datang dari kelompok barista yang beberapa narasumbernya memiliki harapan agar pemerintah Prabowo-Gibran segera menyelesaikan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara), karena bila IKN beroperasi sebagai ibu kota baru Indonesia, maka IKN akan mampu menyediakan lapangan kerja baru kepada rakyat Indonesia, termasuk kepada lulusan baru perguruan tinggi.

Terkait dengan Harapan Masyarakat terhadap Program Kerja yang Harus Diwujudkan oleh Pemerintahan Baru

Secara umum, bagi narasumber dari semua kelompok masyarakat, program kerja yang harus diwujudkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran adalah program perbaikan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Program kerja ini muncul dalam kampanye pasangan ini sehingga harus diwujudkan, terutama untuk memberantas kemiskinan yang masih banyak ditemukan di Indonesia serta mengurangi pengangguran. Salah satu caranya menurut kelompok pengemudi ojek online adalah dengan mengembangkan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang dianggap mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran serta mengatasi kemiskinan di Indonesia. Cara lain menurut mereka adalah dengan menaikkan UMR (Upah Minimum Regional) seperti yang dikemukakan oleh kelompok juru parkir. Bahkan, kelompok tukang becak berpendapat bahwa program kerja yang harus diwujudkan pemerintah Prabowo-Gibran adalah pengembangan wisata di Yogyakarta. Menurut mereka program ini dapat mendatangkan banyak wisatawan, sehingga berpengaruh juga terhadap pendapatan para tukang becak. Selain itu, mereka juga berharap agar pemerintahan yang baru mewujudkan becak *online* agar bisa bersaing dengan transportasi umum masa kini yang sangat terkait dengan teknologi.

Kelompok pengurus lembaga kemahasiswaan menginginkan salah satu program kerja yang harus diwujudkan adalah swasembada pangan, agar masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan baik. Kelompok ini juga menginginkan pemerintahan baru memperhatikan perkembangan teknologi dan komunikasi, khususnya di bidang *blockchain*, karena teknologi ini bisa meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi data. Perhatian terhadap program kerja terkait teknologi yang harus diwujudkan juga datang dari kelompok ojek online yang mana profesi mereka selalu bersentuhan dengan teknologi. Kelompok ini berharap agar

pemerintah Prabowo-Gibran mampu menyediakan dan memperluas akses internet dengan harga terjangkau agar layanan mereka semakin mudah dan terjangkau masyarakat di mana pun. Sementara, kelompok barista menginginkan pemerintahan Prabowo-Gibran meningkatkan kualitas infrastruktur digital. Dengan kualitas infrastruktur digital yang baik, maka masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah, peluang bisnis yang luas, akses kesehatan lebih mudah, dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara.

Satu lagi program kerja yang menurut hampir semua narasumber harus diwujudkan adalah program makan siang gratis. Mereka mengharapkan program kerja ini dapat dilaksanakan hingga ke seluruh wilayah terpencil di Indonesia. Makan siang gratis juga mendapatkan perhatian dari kelompok pengurus lembaga kemahasiswaan. Mereka berharap program kerja makan siang gratis ini diwujudkan tidak hanya untuk siswa SD sampai dengan SMA, tapi juga bisa menjangkau mahasiswa. Program kerja ini juga dikaitkan dengan program pembangunan infrastruktur pendidikan sampai ke daerah terpencil untuk mewujudkan pendidikan berkualitas.

Program kerja lain yang menurut para narasumber harus diwujudkan oleh pemerintah Prabowo-Gibran adalah program-program bantuan sosial seperti pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan BPJS. Bantuan-bantuan sosial ini sudah dijalankan oleh pemerintahan Jokowi dan dinilai sangat membantu perekonomian masyarakat kecil sehingga harus tetap diwujudkan oleh pemerintahan baru. Tanpa bantuan sosial, masyarakat kelas bawah merasa terbebani dengan pengeluaran untuk menutupi kebutuhan dasar rumah tangga mereka. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang murah dan menjangkau seluruh wilayah di Indonesia juga menjadi program kerja yang harus diwujudkan pemerintah baru.

Terkait dengan Tantangan atau Masalah yang Menurut Masyarakat akan Dihadapi oleh Pemerintahan Baru

Menurut narasumber, tantangan atau masalah yang nantinya dihadapi oleh pemerintahan baru sebagian besar datang dari masalah perekonomian secara nasional. Ketidakmerataan ekonomi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah dan antar kelompok dalam masyarakat merupakan contoh masalah ekonomi secara nasional. Kondisi ini membuat pemerintahan baru Prabowo-Gibran sulit untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih dari 5%. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Padahal peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan nilai-nilai kejujuran dan ketertiban, menurut kelompok pengurus lembaga kemahasiswaan menjadi syarat yang harus dipenuhi, apalagi bila Indonesia ingin

tinggal landas menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk diselesaikan.

Banyaknya oknum pejabat yang melakukan tindak korupsi menghambat perekonomian secara nasional. Maraknya korupsi di Indonesia menurunkan minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum mampu menurunkan angka korupsi secara signifikan. Padahal kerugian negara akibat korupsi sangat besar. Kekhawatiran ini disampaikan oleh kelompok ojek online, juru parkir dan PKL.

Tantangan atau masalah lain yang akan dihadapi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mewujudkan program makan siang gratis dan proyek Ibu Kota Nusantara. Dua program kerja ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan dananya diambil dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang bersumber dari pajak yang dibayarkan rakyat. Bila dua program kerja ini direalisasikan, akan muncul pajak baru atau kenaikan pajak untuk item-item yang selama ini sudah dikenai pajak. Jadi, bagi para narasumber, dua program kerja ini akan memberatkan rakyat bila didanai oleh pajak rakyat. Namun, bila bukan dari APBN yang sumber terbesarnya dari pajak rakyat, belum ada kejelasan sumber pendanaan untuk membiayai dua program kerja ini.

Yang juga disampaikan oleh narasumber dari kelompok juru parkir sebagai tantangan atau masalah yang akan dihadapi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran adalah masalah toleransi beragama, terutama dalam hal beribadah dan membangun tempat ibadah. Sampai sekarang, isu ini masih menjadi hal yang sulit diatasi. Kejadian-kejadian intoleransi beragama menjadi penyebab banyak narasumber menyoroti hal ini. Sementara, kelompok pengurus lembaga kemahasiswaan menyoroti konflik politik yang biasanya selalu terjadi dalam setiap pemerintahan. Konflik politik seperti ini dianggap akan tetap menghantui pemerintahan Prabowo-Gibran, apalagi pemerintahan baru ini terbentuk dari koalisi beberapa partai politik. Selain itu, konflik sosial di beberapa daerah dan penanganan kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang berjalan lambat akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan baru. Sementara, kelompok barista menyoroti deforestasi di Kalimantan dan Papua serta perubahan iklim yang berdampak cukup signifikan sebagai salah satu tantangan pemerintah baru.

Terkait dengan Visi Indonesia Emas 2045

Untuk pertanyaan keempat ini, semua kelompok masyarakat memberikan jawaban bahwa pemerintahan baru akan mampu dan tidak mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kelompok yang menjawab bahwa pemerintahan Prabowo-

Gibran mampu memujudkan Indonesia Emas 2045 memberikan alasan sebagai berikut:

- a. Program pemerintah telah disiapkan secara matang. Pemerintah juga sudah melakukan kolaborasi lintas sektor yang mendukung kekuatan ekonomi Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu berkolaborasi dan mengikutsertakan semua pihak dalam masyarakat dalam pelaksanaan program. Keterlibatan semua pihak ini akan sangat membantu keberhasilan program-program pemerintah ke depannya.
- b. Sumber daya manusia Indonesia sudah cukup siap pada 2045. Generasi milenial dan generasi Z saat ini dianggap memiliki kualitas yang cukup baik dan menguasai teknologi maju. Bila pemerintahan Prabowo-Gibran tetap fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan menyiapkan generasi muda saat ini untuk mampu bersaing di tingkat global, maka Indonesia Emas sangat mungkin terwujud.
- c. Perkembangan teknologi di Indonesia sudah cukup maju dan baik. Bila pengembangan teknologi dilaksanakan secara berkesinambungan dengan sumber daya manusia yang sudah cukup baik kualitasnya, maka Indonesia mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045.
- d. Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki program kerja yang kreatif dan inovatif. Bila program kerja ini dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat yang kompeten, maka Indonesia Emas bisa tercapai.

Sementara, narasumber yang menjawab bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045 menyebutkan alasannya sebagai berikut:

- a. Masih banyak program kerja pemerintahan lama yang belum terselesaikan sehingga akan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan baru.
- b. Perekonomian Indonesia masih buruk dan belum stabil karena ketidakmerataan pembangunan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ekonomi yang belum baik ini akan menyedot dana cukup besar untuk memperbaikinya.
- c. Kualitas sumber daya manusia masih rendah. Kualitas yang rendah beririsan dengan banyak hal, seperti kualitas pendidikan yang rendah, kemiskinan yang membuat seseorang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga memengaruhi wawasan dan cara berpikirnya.
- d. Angka pengangguran yang masih tinggi akibat ketersediaan lapangan pekerjaan yang minim.

- e. Angka kemiskinan yang masih tinggi sehingga pemerintah baru masih perlu membuat berbagai kebijakan untuk bisa mengatasinya.
- f. Angka korupsi yang tinggi, khususnya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang membuat berbagai program kebijakan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.
- g. Kualitas pendidikan yang masih buruk. Banyaknya anak-anak yang tidak mendapatkan akses untuk bersekolah membuat kualitas sumber daya manusia Indonesia juga belum baik. Kualitas seperti ini jelas akan menghambat pelaksanaan berbagai kebijakan, sehingga hasil pembangunan tidak akan maksimal karena pendidikan menjadi fondasi dasar dan kuat untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas baik.

Terkait dengan Program Kerja Apa Saja dari Pemerintahan Lama yang Perlu Diteruskan oleh Pemerintahan Baru

Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat meneruskan beberapa program kerja dari pemerintahan sebelumnya. Jawaban dari kelompok masyarakat yang diwawancarai secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Program IKN di Kalimantan Timur. Pembangunan IKN sudah menghabiskan biaya yang sangat besar dan berbagai masalah di Jakarta sebagai ibu kota membuat banyak narasumber memberikan jawaban ini.
- b. Bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) perlu diteruskan tapi perlu diperbaiki pelaksanaannya agar tepat sasaran dan adil. Program sosial seperti ini oleh banyak narasumber dianggap sangat bermanfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka yang penghasilannya kecil.
- c. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi perlu diteruskan dan dilanjutkan ke daerah-daerah yang lebih terpencil. Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi terbukti mampu meningkatkan konektivitas dan perekonomian, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Kemudahan akses ke berbagai tempat membuat distribusi barang dan jasa dari dan ke berbagai daerah menjadi lancar.
- d. Program BPJS Kesehatan yang terbukti sangat membantu meringankan biaya kesehatan saat mereka sakit. Selain itu, program Kartu Prakerja dan JKN juga perlu diteruskan karena terbukti sangat membantu masyarakat kecil.
- a. Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) perlu dilanjutkan karena sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah

untuk menyekolahkan anak-anak mereka, bahkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

- b. Program digitalisasi layanan publik perlu dilanjutkan karena mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik dan mengurangi birokrasi yang rumit. Selain itu, program ini menciptakan efisiensi sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk berbagai berkas fisik yang dulunya harus mereka siapkan.
- c. Program hilirisasi industri yang membuka lapangan kerja dan mengoptimalkan potensi ekonomi.

Dari jawaban di atas, kelompok masyarakat seperti ojek online, juru parkir, tukang becak dan PKL menginginkan program-program sosial dari pemerintah Jokowi seperti bansos dan BPJS diteruskan karena sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka yang berasal dari kalangan bawah. Sementara, kelompok pengurus lembaga kemahasiswaan dan barista lebih banyak menyoroti kelanjutan pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan kehidupan ekonomi serta digitalisasi pelayanan publik di segala bidang.

PEMBAHASAN

Dari hasil suvei sederhana yang sudah dilakukan mahasiswa mata kuliah Sosiologi Politik di atas, terlihat ada beberapa poin jawaban yang intinya sama. Dari lima pertanyaan yang disiapkan, terlihat jelas beberapa kelompok masyarakat memberikan jawaban yang tumpang tindih. Contohnya adalah jawaban-jawaban untuk pertanyaan nomor 1 tentang harapan masyarakat terhadap pemerintahan baru dengan pertanyaan nomor 2 yaitu program kerja apa saja yang harus diwujudkan oleh pemerintahan baru. Jawaban yang muncul dari pertanyaan nomor 1 lebih banyak tentang program kerja yang diharapkan akan diwujudkan oleh pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang sebenarnya terkait dengan pertanyaan nomor 2. Demikian pula dengan pertanyaan nomor 3, 4, dan lima yang jawaban dari narasumber cukup banyak yang tumpang tindih. Ini juga menjadi catatan bagi kami (dosen pengampu dan mahasiswa) untuk bisa membuat pertanyaan yang lebih jelas maksudnya sehingga jawaban narasumber tidak tumpang tindih atau mirip antara pertanyaan satu dengan lainnya.

Selain itu, dari informasi mahasiswa, ada beberapa anggota masyarakat yang menolak menjadi narasumber karena mereka khawatir jawaban mereka akan mendatangkan masalah atau bahkan bahaya di kemudian hari. Kekhawatiran ini cukup beralasan karena pasangan Prabowo-Gibran yang menang dalam Pilpres 2024 dan membentuk pemerintahan baru bukan *incumbent*, sehingga belum jelas kebijakan mereka terhadap masyarakat yang pendapatnya kritis. Ketidakjelasan ini membuat

mereka ini mengambil sikap menolak diwawancarai yang menurut mereka adalah jalan paling aman.

Secara umum, dari semua jawaban narasumber, penulis menyimpulkan bahwa para narasumber cukup melek politik. Walaupun ada beberapa jawaban dari satu atau dua kelompok masyarakat yang menunjukkan pengetahuan politik yang masih kurang, bisa disimpulkan mereka cukup paham dengan kondisi bangsa dan negara Indonesia, khususnya yang menyentuh kehidupan ekonomi mereka. Terlihat jelas bahwa kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih rendah sangat mengharapkan program kerja yang sudah ada seperti bansos dan BPJS Kesehatan tetap diteruskan oleh pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Selain itu, pendidikan murah dan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi juga menjadi harapan untuk dapat mengangkat kehidupan mereka ke arah yang lebih baik.

Mengenai program kerja yang berasal dari pasangan Prabowo-Gibran sendiri, semua kelompok mengetahuinya dan memberikan respons yang cukup positif. Contohnya tentang program makan siang gratis dan penyediaan 19 juta lapangan pekerjaan baru. Saat kampanye dua program kerja ini menjadi daya tarik, menjadi magnet bagi banyak orang untuk memperhatikan pasangan Prabowo-Gibran. Dari sisi komunikasi politik, dapat dikatakan bahwa tim kampanye Prabowo-Gibran sebagai komunikator menyampaikan pesan, dalam hal ini program makan siang gratis dan penyediaan 19 juta lapangan kerja baru, kepada kepada komunikan, yaitu masyarakat pemilih. Masyarakat sebagai penerima pesan (komunikan) sangat antusias mendengar janji kampanye ini dan menganggap dua program kerja tersebut sangat bermanfaat bagi rakyat. Namun, rakyat hanya bersifat pasif dan menerima begitu saja pesan ini. Model komunikasi yang searah ini disebut oleh Harold Laswell sebagai model komunikasi linier yang umumnya dipakai oleh aktor politik untuk menginformasikan atau memengaruhi komunikan (Damsar 2010, 217). Komunikasi model linier ini sangat efektif di masa kampanye karena bisa memengaruhi pilihan publik (rakyat) sebagai penerima pesan. Walaupun tidak ada survei yang membuktikan bahwa pemilih yang memilih Prabowo-Gibran memilih mereka karena dua program kerja yang ditawarkan ini, publik meyakini program makan siang gratis dan janji menyediakan 19 juta lapangan kerja baru menjadi salah satu kunci kemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Namun, ada sebagian kecil narasumber yang meragukan dua program kerja ini bisa berjalan, khususnya program makan siang gratis, karena membutuhkan dana yang luar biasa besar sementara perekonomian Indonesia masih jauh dari stabil dan mapan. Meskipun begitu, dua program kerja ini dianggap jauh lebih menarik dari program kerja dua paslon lain, yang dianggap biasa saja, tidak ada hal baru yang menarik.

Hal lain yang menarik adalah optimisme dari sebagian narasumber bahwa Indonesia Emas 2045 akan bisa diwujudkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran lewat berbagai program kerja dan kebijakan di bawah pemerintahan mereka. Harapan yang tinggi bahwa duet Prabowo-Gibran bisa membantu menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur fisik demi mencapai Indonesia Emas 2045 menunjukkan kepercayaan akan kemampuan pasangan ini dalam membantu menyiapkan dan mewujudkan visi Indonesia tersebut. Namun, sikap kritis juga muncul dari sebagian narasumber yang pesimis bahwa Prabowo-Gibran mampu mewujudkan visi ini. Pesimisme ini muncul dari pandangan mereka tentang berbagai persoalan bangsa seperti level korupsi yang masih tinggi, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, serta kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Berbagai persoalan ini juga menjadi tantangan atau masalah yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Persoalan-persoalan bangsa ini juga tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kesadaran bahwa masih ada bagian atau struktur dari sistem masyarakat yang bermasalah dan mengganggu kerja sistem secara keseluruhan memunculkan harapan bahwa pemerintahan baru akan mampu mengatasinya.

Bila diteropong dari teori struktural fungsional, bagian atau elemen yang rusak dari sebuah struktur memang mengganggu kerja struktur secara keseluruhan. Namun, elemen yang rusak ini tetap memiliki fungsi bagi struktur karena struktur akan bereaksi dengan memunculkan elemen baru yang akan mengatasi elemen yang rusak ini, sehingga struktur sebagai satu kesatuan tetap akan utuh. Hal ini mengikuti pemikiran Ralp Dahrendorf yang mengemukakan asumsi dasar tentang teori struktural fungsional, yaitu:

1. Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif mantap dan stabil.
2. Elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik lewat kaitan dan jalinan yang saling mendukung dan saling tergantung satu sama lain sehingga tercipta keseimbangan.
3. Setiap elemen di dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur tersebut sebagai sebuah sistem.
4. Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya (Damsar 2010, 46-52)

Bila bangsa Indonesia dipahami sebagai sebuah struktur yang elemen-elemen di dalamnya memiliki fungsi yang saling mendukung sehingga menciptakan kestabilan bagi bangsa dan negara Indonesia, maka persoalan-persoalan bangsa Indonesia adalah salah satu elemen yang memiliki fungsi bagi struktur bangsa Indonesia. Elemen yang rusak pun tetap memiliki fungsi bagi struktur karena akan memunculkan elemen lain

untuk mengatasinya agar struktur bisa tetap seimbang. Persoalan-persoalan bangsa Indonesia ini tetap dibutuhkan agar elemen lain seperti sikap kritis dan pesimisme muncul, sehingga mendorong struktur untuk bergerak mencari keseimbangan dengan menawarkan elemen lain untuk mengatasi elemen yang rusak ini. Persoalan bangsa yang masih belum selesai dan masih membayangi bangsa Indonesia seolah menjadi pengingat pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencari keseimbangan struktur bangsa Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk mengatasinya. Elemen yang rusak ini menjadi tantangan atau masalah yang harus diatasi oleh pemerintahan baru agar ke depannya visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Terlepas dari sikap kritis dan pesimisme dari sebagian narasumber, berbagai harapan yang mereka sampaikan untuk dapat diwujudkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa mereka juga tetap menggantungkan harapan kepada Prabowo-Gibran untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.

Rotasi kekuasaan dari pemerintahan Jokowi kepada pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bagaimana demokrasi sudah berjalan di Indonesia. Lepas dari berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya, demokrasi Indonesia tetap berjuang untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintahan baru harapan baru. Optimisme tetap harus dijaga, apalagi pemerintahan Prabowo-Gibran terwujud dari kemenangan pilpres satu putaran dengan suara mayoritas. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik* (1st ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Duverger, M. (2005). *Sosiologi Politik* (D. Dhakidae, Trans.; 1st ed.). Rajagrafindo Persada.
- Farisa, F. C. (2024, March 21). Hasil Lengkap Pemilu 2024: Pilpres dan Pileg. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/21/11334381/hasil-lengkap-pemilu-2024-pilpres-dan-pileg>
- Handoyo, E. (2013). *Sosiologi Politik*. Ombak.
- Nash, K. (2010). *Contemporary political sociology: Globalization, politics, and power* (2. ed). Wiley-Blackwell.
- Rush, M., & Althoff, P. (2008). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rajawali Pers.
- Salim, K., & Efriza. (2019). *Sosiologi Politik: Sejarah, Analisis, dan Dinamika Perkembangan Konsep* (1st ed.). Intrans Publishing.

